

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU



Oleh:

**LARA SYAFITRI
175310115**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 10 November 2021

Yang memberikan pernyataan,

(Materai 10000)

Lara Syafitri
NPM: 175310115



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpojan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : LARA SAFITRI
NPM : 175310115
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 28 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 November 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis *value for money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berdasarkan pada tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan memaparkan tentang analisis data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupa data-data seperti jumlah anggaran, realisasi anggaran hingga capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis dan membandingkan dengan teori yang telah ada. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 2019 belum memenuhi prinsip *value for money*. Pada tahun 2018 ada 10 Program dan 33 kegiatan yang terealisasi terdapat 28 kegiatan bersifat ekonomi dan 26 kegiatan bersifat efisien namun tidak ada kegiatan yang bersifat efektif. Pada tahun 2019 ada 10 program dan 38 kegiatan yang terealisasi terdapat 33 kegiatan bersifat ekonomi, 20 kegiatan bersifat efisien dan 11 kegiatan bersifat efektif. Selain itu, hanya 1 kegiatan yang memenuhi elemen *value for money*. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengevaluasi program kinerja yang dijalankan agar dapat memperbaiki kinerja dan dapat memenuhi elemen *value for money*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mendukung berdasarkan analisis yang dilakukan.

Kata kunci: *value for money*, ekonomi, efisien, efektif

ABSTRACT

This study aims to find out how to apply value for money analysis in the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) Pekanbaru City Transportation Office based on economic level, efficiency and effectiveness. This type of research is qualitative descriptive research because the research conducted describes the analysis of data obtained from the Pekanbaru City Transportation Office in the form of data such as budget amount, budget realization to performance achievement that have been implemented by the Pekanbaru City Transportation office so as to provide a clear enough picture for the authors to analyze and compare with existing theories. Data collection techniques are by documentation methods. The data used is primary data and secondary data.

The results showed that accountability in the Performance Accountability Report of Government Agencies of pekanbaru City Transportation Agency in 2018 and 2019 has not met the principle of value for money. In 2018 there were 10 programs and 33 activities realized there were 28 activities of an economic nature and 26 activities are efficient but no activities are effective. In 2019 there were 10 programs and 38 activities realized there were 33 activities of an economic nature, 20 activities were efficient and 11 activities were effective. In addition, only 1 activity meets the value for money element. Therefore, the Pekanbaru City Transportation Office is expected to evaluate the performance program that is run in order to improve performance and can meet the value for money element. The results of this study are expected to provide supportive input based on the analysis conducted.

Keyword: value for money, economic, efficient, effective

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Atas segala karunia nikmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, beserta staf dan karyawan/ karyawan.
2. Bapak Dr. Firdaus AR., SE., M.Si.Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si.Ak.CA dan Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc.,CA. CPA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi (S-1)
4. Bapak Muhammad Fahdi, SE., M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing Skripsi beserta Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

6. Seluruh Staf, Karyawan/I Tata Usaha (TU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Universitas Islam.
7. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan data serta keterangan yang berguna dalam melakukan penelitian ini.
8. Teristimewa untuk keluarga tercinta Ayahanda “Mispar” dan Ibunda “Wilmateti” serta adik “Wafiq Chairani Febrian” dan “Wahyu Ramadhani”, yang sangat penulis sayangi, dengan do’a, pengertian dan kesabarannya senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat penulis, yaitu Gadis Bunga Cyninthia, Lidya Ayu Dwi Lestari dan seluruh teman-teman di kelas E dan G Program Studi Akuntansi (S-1) Angkatan 2017.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 2021

Penulis,

LARA SYAFITRI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 Konsep Pengukuran Kinerja	13
1. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	13
2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja.....	13
3. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	14
2.1.2 <i>Value For Money</i> (VFM).....	15
1. Pengertian <i>Value for Money</i> (VFM).....	15

2.	Manfaat <i>Value For Money</i>	16
3.	Pengukuran <i>Value for Money</i>	16
4.	Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	17
5.	Langkah-Langkah Pengukuran <i>Value for Money</i>	19
6.	Estimasi Indikator Kinerja.....	22
7.	Pengertian dan Elemen indikator kinerja pada <i>value for money</i>	24
8.	Manfaat Implementasi Konsep <i>Value For Money</i>	25
2.1.3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	25
1.	Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 25	
2.	Manfaat Penyusunan LAKIP.....	26
3.	Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP	27
4.	Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	27
5.	Mekanisme LAKIP.....	29
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3	Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Desain Penelitian	35
3.2	Objek Penelitian	35
3.3	Definisi Variabel Penelitian	35
3.4	Jenis dan Sumber Data	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	41
4.1.2	Tujuan dan Sasaran	42
4.1.3	Strategi dan kebijakan	44
4.1.4	Struktur organisasi	44
4.2	Hasil penelitian.....	46
4.3	Pembahasan	79
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		84
5.1	Simpulan.....	84
5.2	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN.....
BIODATA PENULIS.....



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan 2019 dan 2018.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomi Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	48
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomi Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	53
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	60
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	64
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018	71
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengukuran <i>Value for Money</i>	17
Gambar 2.2 Elemen-elemen Pengukuran kinerja VFM.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan 2018

Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Lampiran 3 : Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan 2019

Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Lampiran 5 : Biodata Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan jasa transportasi, komunikasi dan informatika sangat penting dalam upaya meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di bidang perhubungan. Dalam upaya pembangunan tersebut tentunya ada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas desentralisasi dan otonomi daerah sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pembangunan memerlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menilai kinerja dan tanggungjawab dari organisasi sektor publik tersebut. (Ismail, 2018) mengemukakan bahwa dalam sektor publik, “pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin/ pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat”.

Terdapat beberapa cara dalam pengukuran kinerja untuk menilai transparansi dan akuntabilitas dalam menilai kinerja dan tanggungjawab organisasi sektor publik diantaranya yaitu *Balanced Scorecard* dan *Value for Money* (VFM). Tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan analisis berbasis *value for money* karena terdapat pengukuran keberhasilan suatu program yang dijalankan. *Value for money* sangat penting dalam pengukuran kinerja pada

organisasi pemerintah karena menjadi inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran *value for money* memiliki tiga unsur utama yaitu Ekonomi, Efisien, dan Efektif. Tiga pokok bahasan dalam indikator *value for money* saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Ekonomi berkaitan dengan masukan (*input*), efisiensi berkaitan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas berkaitan dengan keluaran (*ouput*) dan dampak (*outcome*) (Mardiasmo, 2018).

Adapun salah satu instansi pemerintah di Kota Pekanbaru yang menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tentunya sebagai instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK. Selain itu instansi pemerintah juga perlu membuat dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. (Nursamah, 2018) menjelaskan bahwa untuk setiap tahunnya instansi pemerintah wajib membuat Laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang disusun secara sistematis. LAKIP ini perlu untuk dilakukan pengukuran seperti pengukuran menggunakan konsep

value for money yang tentunya dapat memberikan analisis dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Hasil dari pengukuran analisis kinerja ini juga memberikan gambaran mengenai akuntabilitas kinerja dari suatu instansi dalam merealisasikan program-programnya selain itu juga sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja suatu instansi. (Kasdjan, 2013) menegaskan bahwa pentingnya sebuah pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 1.1 dibawah ini adalah hasil pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Kerangka pengukuran kinerja kegiatan dimulai dari tahap pengumpulan data realisasi kinerja sampai dengan pengukuran kinerja kegiatan atau program yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja dalam memberikan gambaran pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan 2019 dan 2018

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET		TARGET	
		KINERJA 2018	FISIK	KINERJA 2019	FISIK
1	2	4	5	6	7
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG				

-	Gaji, Tunjangan, dll	100%	100%	100%	100%
B	BELANJA LANGSUNG				
1	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>				
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	95%	85%	85%
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
-	Penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	90%	90%
-	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%	100%
2	<u>Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur</u>				
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	95%	85%	85%	85%
-	Pengadaan Peralatan	95%	85%	75%	75%

	Gedung Kantor				
-	Pengadaan mebeuler	100%	100%	60%	60%
-	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	100%	100%	45%	45%
3	<u>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</u>				
-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100 %	45%	45%
4	<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>				
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85%	75 %	88%	88 %
5	<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>				
-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%
-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%	100%	100%
-	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%
6	<u>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</u>				
-	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan	75%	75%	0	0
-	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0	0	88%	88%
-	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	100%	100%	92%	95%
-	Peningkatan	0	0	100%	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

	pengelolaan terminal angkutan darat				
7	<u>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</u>				
-	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	95%	85%	100%	100%
-	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	95%	86%	76%	80%
-	Rehabilitasi/pemeliharaan pusat kendali manajemen dan informasi lalu lintas	0	0	43%	50%
8	<u>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</u>				
-	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan	0	0	61%	65%
-	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	85%	75%	87%	90%
-	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	100%	100%	100%	100%
-	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	100%	100%	86%	90%
-	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	0	0	0%	0%
-	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	85%	75%	52%	55%
-	Pengembangan sarana dan prasarana	90%	85%	76%	80%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	pelayanan jasa angkutan				
-	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	80%	75%	74%	80%
-	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	95%	90%	100%	100%
9	<u>Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan</u>				
-	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	0	0	78%	80%
10	<u>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</u>				
-	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	95%	85%	78%	80%
-	Pengadaan marka jalan	0	0	100%	100%
11	<u>Penerangan Jalan Umum dan Penerangan</u>				
-	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	90%	85%	61%	65%

Sumber: LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Pengukuran kinerja dari program-program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terdapat pada LAKIP tahun 2018 dan 2019 diatas merupakan pengukuran kinerja tersebut berdasarkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target). Data pada LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menunjukkan di tahun 2018 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami peningkatan. Sama halnya

dengan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun 2019 yaitu 80%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui hasil kinerja kegiatan tahun 2018-2019 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan di tahun 2019 dibanding tahun 2018 pada program-program kinerja yang dijalankan. Tentunya itu semua tidak terlepas dari kendala yang dihadapi seperti minimnya dana dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak hanya terikat pada APBD Kota Pekanbaru tetapi juga mengupayakan mencari bantuan dari APBD Provinsi Riau bahkan APBN Pusat.

Kemudian pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ada pengukuran kinerja seperti perhitungan secara rinci tentang tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas dalam mengukur kinerja keuangannya. Kemudian untuk mengetahui bahwa program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi maka perlu untuk dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai sektor publik lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian diatas, dengan dikemukakannya alasan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian didukung oleh latar belakang masalah sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis berbasis konsep *value for money*

yang berguna yaitu sebagai pengukur akuntabilitas kinerja khususnya pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis *value for money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis akuntabilitas kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan analisis *value for money* yang terfokus pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Sebagai pengetahuan mengenai program kinerja, anggaran yang dibutuhkan, serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja yang dijalankan.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai penilaian pada program kinerja yang telah dijalankan berdasarkan analisis *value for money* khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Universitas Islam Riau : penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur, referensi karya tulis ilmiah dan kepustakaan bagi Universitas Islam Riau sehingga mampu memberikan masukan-masukan bagi pihak yang akan mendalami topik yang sama.
2. Bagi Organisasi : penelitian ini diharapkan bisa menyediakan gambaran dan masukan bagi pihak manajemen Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang penilaian program kinerja yang telah dijalankan dengan menggunakan metode *value for money* sebagai bahan dalam mengevaluasi kinerja yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat : dengan penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang program kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Serta dapat mengetahui anggaran terealisasi untuk program yang direncanakan dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
4. Bagi Penulis : dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan secara langsung dari lapangan tentang program kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain itu juga

sebagia sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan terutama teori akuntansi khususnya yang berhubungan dengan *value for money* yang penulis dapatkan semasa perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini menggambarkan secara sekilas tentang penelitian yang penulis lakukan. Pada bagian-bagian bab menampakan topik yang berbeda-beda. Namun, dalam bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Untuk itu penulis menguraikan isi dan penjelasan untuk masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi pendahuluan yang merupakan pokok dari pemikiran dan dijabarkan dalam bentuk yang jelas dan padat. Oleh karena itu deskripsi penelitian dimulai dengan latar belakang masalah diantaranya merangkum tentang alasan mengapa melakukan penelitian dan apa saja pokok permasalahannya. Dengan penjabaran secara sekilas namun dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian ditinjau secara teoritis. Selain itu juga dijabarkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini hingga bentuk sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi telaah pustaka yang berdasarkan pada teori-teori pendukung yang saling berhubungan dengan topik penelitian yang

akan dilakukan. Teori-teori pendukung ini akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah. Tentunya teori-teori ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yaitu bagaimana cara-cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan bagaimana penelitian dilakukan mulai dari penentuan desain penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian dilakukan seperti visi, misi, sasaran hingga strategi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang hasil dari analisis data yang penulis lakukan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang penulis lakukan. Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Konsep Pengukuran Kinerja

1. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Secara umum, pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/ kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan dengan tujuan dari kegiatan/ kebijakan. Jadi pengukuran kinerja terbatas sebagai alat dalam menilai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan kegiatan yang sistematis dengan memberikan gambaran tentang pencapaian atas pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Penilaian atas pencapaian ini, dapat dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi kedepannya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat membantu para manajer organisasi dalam membuat keputusan-keputusan yang akan diambil dalam organisasi.

2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo, 2018:152) adalah:

- a. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*);

- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotifasi untuk mencapai *goal congruence*; dan
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo, 2018:153) adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Berdasarkan manfaat-manfaat dari pengukuran kinerja diatas bisa disimpulkan bahwa manfaat dari pengukuran kinerja mencangkup lebih luas lagi. Pengukuran kinerja tidak hanya terpaku pada kelemahan-kelemahan yang seharusnya diperbaiki. Tetapi sebaliknya juga pada kelebihan-kelebihan dalam pencapaian kinerja yang dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

2.1.2 *Value For Money* (VFM)

1. Pengertian *Value for Money* (VFM)

Pengertian *value for money* menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Value for money merupakan bentuk penilaian kinerja pada suatu organisasi sektor publik dimana tingkat keberhasilan suatu program kerja menjadi penentunya yang berdasarkan pada tiga unsur utama yaitu, ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Riadi, 2020).

Value for money merupakan inti dari pengukuran program kinerja pada suatu organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja pemerintah diniai dari segi *input*, *output*, dan *outcome* bahkan jika perlu bisa ditambah pengukuran seperti distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*) (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan pengertian-pengertian *value for money* di atas bisa disimpulkan bahwa *value for money* adalah inti dari penilaian kinerja pada sebuah organisasi sektor publik yang mengacu pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian ini dapat mengukur capaian kesuksesan sebuah program kerja yang dilaksanakan. Penilaian ini tidak hanya berorientasi pada *output* yang

dihasilkan tetapi juga mempertimbangkan *input* dan *outcome* secara bersama-sama.

2. Manfaat *Value For Money*

Value for money mempunyai beberapa manfaat dalam pengukuran kinerja. Diantaranya yaitu membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas publik itu sendiri. Selain itu, *value for money* dapat juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran (Kuncoro, 2020).

Secara umum, manfaat dari *value fo money* adalah untuk membantu lembaga pemerintah agar bisa memberikan pemahaman terhadap uang publik yang merupakan akar manifestasi akuntabilitas publik. Dengan adanya *value for money* ini dapat diketahui kualitas dari pelayanan yang diberikan.

3. Pengukuran *Value for Money*

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntanbilitas publik (Mardiasmo, 2018).

Gambar 2.1
Pengukuran *Value for Money*



Sumber: (Kasdjan, 2013) / datakata.wordpress.com

Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat meliputi pertanggungjawaban tentang penerapan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam artian meminimalkan pemakaian sumber daya kemudian memaksimalkan hasilnya (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

4. Pengembangan Indikator *Value for Money*

kontribusi indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi untuk peninjauan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2018).

Terdapat Tiga hal utama dalam Indikator *Value for Money*. Selain itu, telah ditekankan sebelumnya bahwa *value for money* adalah dasar pengukuran kinerja pada unit sektor publik. Pengembangan indikator kinerja diantaranya meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan. Berikut ini akan diuraikan tentang konsep *value for money* atau biasa disebut 3E.

a. Indikator Ekonomi

Ekonomi adalah keterkaitan antara pasar dan masukan (*cash of input*). Oleh karena itu, ekonomi adalah praktik pembelian barang/ jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila bisa menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Jika ada kenaikan biaya maka diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar juga.

b. Indikator efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu bisa dicapai dengan penggunaan sumber daya atau dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Indikator efisiensi berkaitan dengan sumber daya (masukan) oleh suatu unit organisasi (misalnya: upah, staff, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

c. Indikator efektivitas

Pengertian efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

5. Langkah-Langkah Pengukuran *Value for Money*

a. Pengukuran ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif (Mardiasmo, 2018).

Adapun rumus pengukuran ekonomi sebagai berikut:

$$Ekonomis = \frac{Input}{Input\ Value} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran

Input Value : Anggaran

b. Pengukuran efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2018). Adapun rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

Output : Hasil yang dicapai melalui kebijakan program dan juga aktivitas

Input : Realisasi Anggaran

Rasio efisiensi dinyatakan dalam bentuk relatif. Seperti misalkan, unit B lebih efisien dibandingkan dengan unit A, Unit C lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
 - 2) Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*
 - 3) Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama
 - 4) Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*
- c. Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2018). Adapun rumus pengukuran efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

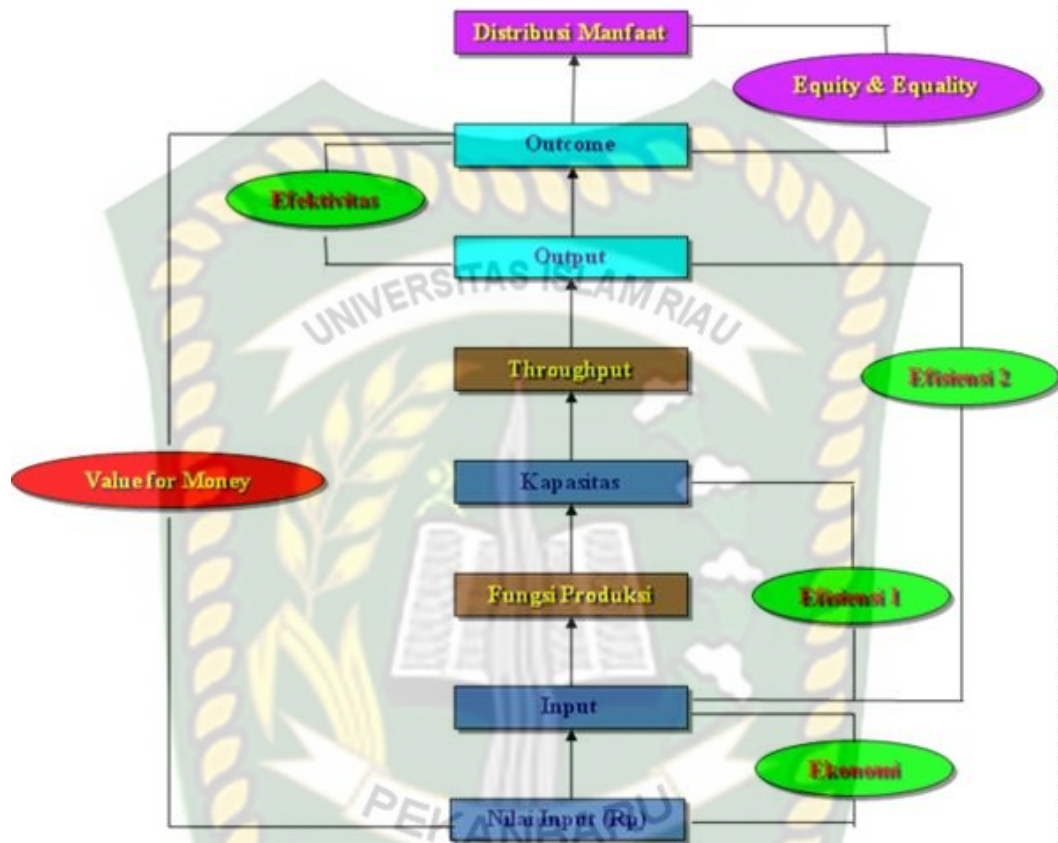
Outcome : Dampak dari sebuah kegiatan

Output : Hasil yang dicapai oleh kebijakan sebuah program.

d. Pengukuran *outcome*

Pengukuran *Outcome* itu merupakan efek dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospek dan prospektif. Peran retrospek berhubungan dengan penilaian kinerja dimasa lalu. Sedangkan peran prospektif berhubungan dengan perencanaan kerja di masa mendatang (Mardiasmo, 2018).

Gambar 1.2
Elemen-elemen Pengukuran kinerja VFM



Sumber: (Kasdjani, 2013) / datakata.wordpress.com

6. Estimasi Indikator Kinerja

Suatu unit organisasi perlu melaksanakan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode yang akan datang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja (Mardiasmo, 2018). Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa hal berikut:

a. Kinerja tahun lalu

Kinerja unit tahun lalu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Hal tersebut merupakan *benchmark* (perbandingan) bagi unit

tersebut untuk mengetahui seberapa besar kinerja yang telah dilaksanakan. Alasan lainnya adalah karena adanya *time lag* antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak (*outcome*) yang timbul akibat aktivitas tersebut. Hal ini terjadi karena efek dari aktivitas yang dilakukan dalam tahun berjalan baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian.

b. *Expert judgement*

Expert judgement digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. *Expert judgement* umumnya digunakan untuk melakukan estimasi kerja. Selain penggunaannya yang sederhana, dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. tetapi memiliki kelemahan seperti teknik ini sangat tergantung pada pandangan subjektif para pengambil keputusan.

c. *Trend*

Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja.

$$Y = a + bt$$

Di mana,

Y = indikator kinerja

a = indikator kinerja *autonomous*

t = *time lag*

d. Regresi

Regresi ini menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dengan menggunakan rumus regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variable dependen (kinerja unit).

7. Pengertian dan Elemen indikator kinerja pada *value for money*

(Warsito, 2018) menjelaskan bahwa Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja pada suatu instansi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan . Berikut elemen-elemen indikator pada *value for money* menurut situs (Pengadaan (Eprocurement), 2019):

a. Ekonomi

Ekonomi adalah kemampuan dalam memperoleh sumber daya (input) yang berkualitas dengan harga serendah-rendahnya. Ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak produktif.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah perolehan output yang ideal dengan input tertentu dalam mencapai output tertentu berdasarkan penggunaan input yang serendah mungkin. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang berhubungan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas

Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

8. Manfaat Implementasi Konsep *Value For Money*

Dikutip dari situs (Pengadaan (Eprocurement), 2019) penerapan dari konsep *value for money* dikatakan dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik lebih baik lagi. Manfaat implementasi dari konsep *value for money* pada organisasi sektor publik diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu, dan
- e. Meningkatkan kesadaran akan dana publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai

oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD (Nursamah, 2018).

LAKIP merupakan salah satu sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholder* dan evaluasi atas pencapaian kinerja instansi pemerintah (Inmas, 2017).

Dari pengertian-pengertian LAKIP di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu laporan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan pencapaian dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan realisasi penggunaan APBN/APBD kepada *stakeholder* diantaranya pemerintah pusat serta masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas sebagai organisasi sektor publik.

2. Manfaat Penyusunan LAKIP

Manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya LAKIP menurut Mursyid_{her} dalam (Inmas, 2017) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas.
- b. Sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
- d. Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, dan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel.

3. Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP

Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP menurut (Nordiawan & Hertianti, 2014) diantaranya yaitu:

- a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta memuat kegagalan dan keberhasilan.
- b. Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

4. Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut (Nordiawan & Hertianti, 2014) terdiri dari beberapa hal seperti :

1. Ikhtisar eksekutif

Bagian ini menjabarkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh apa instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran utamanya, serta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini dijabarkan juga tahapan yang telah dilakukan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut dan langkah pencegahan untuk menaggulangi hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi pada tahun yang akan datang.

2. Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang umum mengenai instansi dan uraian singkat tentang tugas yang dibebankan kepada instansi tersebut (gambaran umum tupoksi).

3. Rencana strategis

Pada bab ini memberikan gambaran singkat tentang rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bagian awal bab ini berisi gambaran singkat mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana hubungannya dengan capaian visi dan misi instansi.

4. Akuntabilitas kinerja

Pada bagian bab ini memaparkan dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisis akuntabilitas kinerja. Selain itu termasuk juga di dalamnya tentang keberhasilan atau kegagalan, hambatan kendala, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil secara sistematis.

Selain itu, akuntabilitas keuangan juga menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

5. Penutup

Penutup berisi kajian secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

6. Lampiran-lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung, seperti SDM, sarana prasarana, metode, serta aspek lain dan data yang relevan sebaiknya tidak diuraikan dalam teks laporan, tetapi dimasukkan ke dalam lampiran.

5. **Mekanisme LAKIP**

Adapun mekanisme LAKIP menurut (Nordawan & Hertianti, 2014) yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pemimpin departemen/LPND, pemerintah daerah, satuan kerja, atau unit kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada atasannya.
- b. LAKIP tahunan dari setiap departemen/LPND, setiap menteri/pimpinan LPND menyampaikan kepada presiden dan wakil presiden dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- c. LAKIP tahunan dari setiap pemerintah provinsi disampaikan kepada presiden/wakil presiden dengan tembusan kepada menteri dalam negeri, menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, dan kepala BPKP.
- d. LAKIP tahunan pemerintah kabupaten/ kota disampaikan kepada presiden/ wakil presiden dengan tembusan kepada menteri dalam negeri, gubernur/ kepala pemerintah daerah provinsi, dan kepala perwakilan (BPKP).

- e. Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan hasilnya kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dan salinannya kepada kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- f. Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu baik berupa jurnal atau skripsi yang serupa:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	A.B Setiawan dan W. Gusnita	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor	Metode Deskriptif	<p>1. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pembahasan rencana kerja pada LAKIP pencapaian rencana kerja dari tahun 2010-2014 sudah terealisasi dengan baik kecuali pada rencana kerja sasaran 3 pada LAKIP dikarenakan apa yang telah direncanakan baru terealisasi pada tahun ke 5.</p> <p>2. Pembahasan hasil</p>

				<p>perhitungan ekonomi tahun 2010-2014 menggunakan analisis VFM dikatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitnak Caiwi Bogor tahun 2010-2014 sangat ekonomi kecuali pada tahun 2011 karena dari 16 program kerja hanya 1 kegiatan yang kurang ekonomi.</p> <p>3. Pembahasan hasil perhitungan efisiensi tahun 2010-2014 dikatakan sangat efisien kecuali pada tahun 2011 karena hanya 1 kegiatan yang kurang efisien.</p> <p>4. Pembahasan hasil perhitungan efektivitas tahun 2010-2014 yaitu hasil perhitungan efektivitas ada beberapa sasaran yang efektif dan ada juga beberapa sasaran yang tidak efektif</p>
2.	R.A. Rizky Ulfa Ridhotillah	Analisis Pengukuran Kinerja Lakip Dengan Menggunakan <i>Value For Money</i> Pada Dinas	Metode Deskriptif	Pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Palembang baik tahun 2010, 2011, dan 2012 menunjukkan realisasi pendapatan lebih kecil

		Kesehatan Kota Palembang		dari realisasi belanja
3.	Nur Zeni Amilia Putri	Analisis <i>Value for Money</i> pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Metode Deskriptif Kualitatif dan Metode <i>Value For Money</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada program kesehatan masyarakat dan program perbaikan gizi masyarakat tahun 2016 dan 2018 sudah sangat baik, kecuali pada program farmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan yang dikategorikan baik. 2. Pada tahun 2018 hanya program perbaikan gizi yang sangat baik dan penggunaan anggaran dari tahun 2016-2018 dinyatakan efisien. 3. Analisis <i>value for money</i> pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap program kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, dan program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan dari tahun 2016-2018 dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif.
4.	Yosie	Analisis <i>Value For</i>	Metode	Hasil dari penelitian

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	Dwinanda	<i>Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.	deskriptif komparatif	ini dapat diketahui kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta secara keseluruhan kegiatan di tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien dan kurang efektif
5.	Dwi Purwiyanti	Analisis Kinerja Berbasis Konsep <i>Value For Money</i> Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	Metode Deskriptif	Hasil penelitian mengenai kinerja Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi dapat disimpulkan dalam beberapa poin yaitu: 6. Berdasarkan rasio ekonomi, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomi. 7. Berdasarkan rasio efisiensi, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara efisien. 8. Berdasarkan rasio efektivitas, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya secara efektif.

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini berdasarkan pada uraian-uraian teori diatas, dapat penulis rumuskan hipotesis yakni akuntabilitas kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip *Value for Money* yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Prasetyo, 2016). Penelitian deskriptif kualitatif ini menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan mendapatkan informasi yaitu mengenai akuntabilitas kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan menggunakan analisis *Value For Money* (VFM).

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas perhubungan Kota Pekanbaru periode 2018-2019.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *value for money* dimana analisis *value for money* akan menjadi konsep dalam menilai dan menganalisa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan kegiatan dan program kerja. Analisis *Value for money* akan menilai kesuksesan program-program kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan sejauh mana kinerja dari program-program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meminimalkan input yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang kurang produktif. Adapun rumus pengukuran ekonomi menurut (Kuncoro, 2020) sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran

Input Value : Anggaran

Kriteria ekonomis yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya ekonomis.
- b. Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya ekonomis berimbang.

- c. Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan menggunakan rasio output dan input. Efisiensi direfleksikan dengan semakin besar output dibandingkan dengan inputnya maka semakin tinggi pula efisiensi kinerja dari pada program-program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun rumus pengukuran tingkat efisiensi ini (Kuncoro, 2020) sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

Output : Hasil yang dicapai melalui kebijakan program dan juga aktivitas

Input : Realisasi Anggaran

Kriteria efisiensi yang dimaksud sebagai berikut:

- Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya tidak efisien.
- Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya efisiensi cukup seimbang.
- Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya efisien.

3. Efektivitas

Efektivitas yaitu mengukur keberhasilan kinerja dari program-program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus pengukuran efektivitas (Kuncoro, 2020) sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Keterangan:

Outcome : Dampak dari suatu kegiatan

Output : Hasil yang dicapai oleh kebijakan suatu program.

Kriteria efektivitas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya tidak efektif.
- b. Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya efektivitas cukup berimbang.
- c. Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya sangat efektif.

4. Input

Input bisa dikatakan sebagai sumber daya yang digunakan dalam merealisasikan atau menjalankan program-program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

5. Output

Output merupakan hasil, sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam realisasi program-program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

6. Outcome

Outcome yaitu mengukur kualitas dari output terhadap efek yang dihasilkannya. Output bisa bermanfaat dalam penilaian kinerja dari program-program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada periode yang telah berlalu dan penilaian ini juga dapat membantu perencanaan yang bermanfaat untuk periode kerja di masa yang akan datang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dianalisis pada penelitian ini menggunakan data sekunder (*Secondary data*) yang mengarah pada informasi yang bisa dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen publikasi pemerintah daerah seperti data anggaran berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2018-2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen organisasi yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi diperlukan melalui data yang tersedia, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta dokumen lain-lain yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian akan dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini akan menyajikan data dan menjelaskan hasil dari pengukuran kinerja organisasi yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan menggunakan konsep *value for money*. Analisis *value for money* akan mengukur akuntabilitas kinerja organisasi berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Hal ini digunakan untuk melihat pemahaman kinerja suatu organisasi berdasarkan konsep *value for money* sebagai organisasi sektor publik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, lengkap, handal dan terjangkau.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjabarkannya menjadi empat buah misi, yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.

- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun kedepan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional serta memahami peraturan perundangan yang berlaku pada masing-masing sub sektor dalam lingkup perhubungan.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan guna menyediakan pelayanan jasa perhubungan yang handal dengan sistem Pelayanan Terpadu, dilaksanakan secara sinergis dan kemitraan antara berbagai pihak, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan jasa perhubungan yang dibutuhkan secara mudah.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan sarana, prasarana dan sistem jaringan transportasi guna memberikan pelayanan yang handal dan prima serta memadai dengan pendekatan internal dan bekerjasama dengan pihak terkait.

4. Merekayasa dalam mengatur kendaraan dengan ketersediaan jalan dengan tujuan memberikan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan pengawasan operasional perhubungan guna peningkatan disiplin pengguna jasa perhubungan yang dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan.
6. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.
7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
8. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai.
9. Terciptanya penerangan jalan umum yang memadai.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Aparatur perhubungan yang profesional.
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan.
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat.
5. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan.
6. Penerangan jalan umum yang memadai pada kota Pekanbaru dengan diadakannya meterisasi.

4.1.3 Strategi dan kebijakan

Adapun strategi dan kebijakan-kebijakan yang diambil digunakan untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan, antara lain:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis pengoperasian *feeder* dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses angkutan umum massal diluar koridor utama.
2. Mengoperasikan bus
3. Sekolah secara gratis yang dimana bus sekolah didapat dengan bantuan dari kementerian perhubungan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh para pelajar.

4.1.4 Struktur organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Program.
3. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi
4. Bidang Angkutan, membawahi:

- a. Seksi Angkutan Orang
- b. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
- c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan
5. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi
 - a. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - b. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - c. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
6. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana Dan Prasarana, membawahi
 - a. Seksi Teknik Sarana, Prasarana Jalan dan Perairan
 - b. Seksi Penerangan Jalan
 - c. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas, yaitu:

1. Melaksanakan Kewenangan Daerah dalam Bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah;
2. Memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staff Dinas;
3. Menyusun Rencana dan Program Bidang Perhubungan Kota Pekanbaru;
4. Menyusun kebijakan pelaksanaan di Bidang Perhubungan;

5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Sekretariat, Bidang Angkutan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sektor Perhubungan;
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
4. Pembinaan dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4.2 Hasil penelitian

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan juga dijabarkan dalam bentuk Laporan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru peneliti menggunakan analisis *Value for*

Money yang terfokus pada 3 elemen utama yaitu pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebagai berikut:

1. Tingkat Ekonomis

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan analisis *value for money* maka indikator ekonomis adalah membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran dikalikan 100%.

Tingkat ekonomi

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Kriteria ekonomis

- a. Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya ekonomis
- b. Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya ekonomis berimbang
- c. Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya tidak ekonomis

Dengan rumus diatas dapat dilakukan analisis tingkat ekonomi pada Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomi Pada Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat ekonomi
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	9.600.000	100%
2	Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108.451.220.294	68.046.006.492	63%
3	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.780.096.000	1.451.621.760	82%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	831.208.450	696.981.150	84%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	66.800.000	66.800.000	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	93.969.270	91.541.076	97%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.420.000	55.661.000	89%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90.764.834	25.967.150	29%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	10.080.000	10.080.000	100%

	undangan			
10	Penyediaan makanan dan minuman	137.286.000	76.578.000	56%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	794.000.000	768.398.549	97%
B	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	231.665.000	208.450.000	90%
2	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	78.000.000	70.741.000	91%
3	Pengadaan mebeuler	41.000.000	25.679.500	63%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	158.774.400	151.087.100	95%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	496.300.000	414.667.000	84%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	149.000.000	78.595.259	53%
E	Program Peningkatan			

	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.850.000	97%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.350.000	2.350.000	100%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	7.000.000	7.000.000	100%
F	Program Pembangunan Prasarana dan Easilitas Perhubungan			
1	Penyusunan Kebijakan Norma, Standard an Prosedur bidang Perhubungan	21.000.000	13.350.000	64%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	450.939.385	448.299.659	99%
G	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/Pe meliharaan sarana alat pengujian	487.524.000	434.381.000	89%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	kendaraan bermotor			
2	Rehabilitasi/Peeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	1.914.002.500	1.608.152.250	84%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	2.332.335.000	2.043.144.200	88%
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	2.851.185.000	2.754.826.500	97%
3	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	933.553.750	909.144.750	97%
4	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	1.118.002.500	529.634.625	47%
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	42.694.842.175	31.637.097.454	74%
6	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	299.582.000	248.652.900	83%
7	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	733.164.000	247.923.000	34%
I	Program			

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	215.000.000	0	0%
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	2.435.473.047	2.031.403.750	83%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	6.155.738.400	1.319.264.550	21%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1, pada tahun 2018 terdapat 11 Program dan diantaranya terdapat 33 kegiatan yang terealisasi. Dari 33 kegiatan sebanyak 28 kegiatan memiliki nilai ekonomis dibawah 100% sedangkan 5 kegiatan memiliki nilai ekonomis sebesar 100%. Sedangkan 1 kegiatan lainnya yaitu kegiatan pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal memiliki nilai 0% karena tidak adanya realisasi anggaran.

Selanjutnya peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada Program dan Kegiatan yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomi Pada Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat ekonomi
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	100%
2	Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.467.596.057	34.093.290.283	72%
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.333.939.000	990.345.218	74%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	695.744.800	653.204.500	94%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	68.600.000	64.270.000	94%
6	Penyediaan alat tulis kantor	90.442.040	86.530.400	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.331.000	75.826.387	97%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.102.000	5.975.500	98%

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.080.000	8.400.000	83%
10	Penyediaan makanan dan minuman	83.543.125	71.537.922	86%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	860.000.000	839.027.975	98%
B	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	95.437.500	89.265.000	94%
2	Pengandaan peralatan Gedung Kantor	702.450.000	527.626.000	75%
3	Pengadaan mebeuler	569.900.000	292.696.404	51%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	960.000.000	315.167.300	33%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	219.500.000	65.450.000	30%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	200.000.000	175.172.380	88%

	Perundang-undangan			
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.500.000	10.480.000	100%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.000.000	3.000.000	100%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	7.498.600	7.458.600	99%
F	Program Pembangunan Prasarana dan Easilitas Perhubungan			
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	500.000.000	441.623.000	88%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	1.413.876.190	1.306.791.426	92%
3	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	287.284.000	275.141.250	96%
G	Program Rehabilitasi/Pe			

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	meliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/Peeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	2.207.614.000	2.094.143.000	95%
2	Rehabilitasi/Peeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	1.389.356.871	1.056.939.700	76%
3	Rehabilitasi/Peeliharaan pusat kendali manajemen dan informasi lalu lintas	820.216.000	354.910.834	43%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Kegiatan penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan	38.556.000	23.546.900	61%
2	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	2.232.193.700	1.937.901.700	87%
3	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	3.117.275.000	2.963.750.500	95%
4	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	2.005.731.000	1.731.577.100	86%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

5	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	129.284.500	117.034.550	91%
6	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	401.250.000	203.142.500	51%
7	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	30.692.500	0	0%
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	8.231.900.497	Rp 6.293.028.733	76%
9	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	64.493.000	47.850.000	74%
10	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	77.522.000	77.522.000	100%
I	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	0	0	0%
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1.815.786.000	1.418.285.600	78%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

2	Pengadaan marka jalan	976.000.000	963.804.180	99%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	21.088.774.300	12.900.357.856	61%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.2, sama halnya dengan tahun 2018 ada 11 program tetapi terdapat 38 Kegiatan yang terealisasi. Dari 38 kegiatan sebanyak 33 kegiatan nilai ekonominya berada dibawah 100%. Kemudian, 5 kegiatan lainnya berada pada tingkat ekonomi berimbang yaitu sebesar 100%. Selain itu, 1 kegiatan lainnya yaitu kegiatan Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan memiliki nilai ekonomis 0% karena anggaran kegiatan tersebut tidak terealisasi.

2. Tingkat Efisiensi

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan analisis *value for money* maka indikator efisien adalah membandingkan hasil yang dicapai melalui kebijakan program dan juga aktivitas dengan anggaran dikalikan 100%.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Kriteria efisiensi:

- a. Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya tidak efisien.
- b. Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya efisiensi cukup seimbang.
- c. Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya efisien.

Dengan rumus diatas dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi pada LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Pada Program dan Kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian Target	Tingkat Efisiensi
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	100%	100%
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.046.006.492	100%	159%
3	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.451.621.760	100%	123%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	696.981.150	100%	119%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	66.800.000	100%	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	91.541.076	100%	103%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.661.000	100%	112%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.967.150	100%	350%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	10.080.000	100%	100%

	undangan			
10	Penyediaan makanan dan minuman	76.578.000	100%	179%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	768.398.549	100%	103%
B	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	208.450.000	95%	106%
2	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	70.741.000	95%	105%
3	Pengadaan mebeuler	25.679.500	100%	160%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	151.087.100	100%	105%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	414.667.000	100%	120%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	78.595.259	85%	161%

	undangan			
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.850.000	100%	103%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.350.000	100%	100%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	7.000.000	100%	100%
F	Program Pembangunan Prasarana dan Easilitas Perhubungan			
1	Penyusunan Kebijakan Norma, Standard an Prosedur bidang Perhubungan	13.350.000	75%	118%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	448.299.659	100%	101%
G	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana	434.381.000	95%	107%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	alat pengujian kendaraan bermotor			
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	1.608.152.250	95%	113%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	2.043.144.200	85%	97%
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	2.754.826.500	100%	103%
3	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	909.144.750	100%	103%
4	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	529.634.625	85%	179%
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	31.637.097.454	90%	121%
6	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	248.652.900	80%	96%
7	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	247.923.000	95%	281%
I	Program Pembangunan Sarana dan			

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	215.000.000	0%	0%
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	2.031.403.750	95%	114%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	1.319.264.550	90%	420%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 26 kegiatan dengan nilai efisiensi diatas 100% dan terdapat 5 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Selain itu 2 kegiatan lainnya memiliki nilai efisiensi dibawah 100%.

Tabel 4.4

Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Realisasi (Rp)	Persentase capaian target	Tingkat efisiensi
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa	15.000.000	100%	100%

	Surat Menyurat			
2	Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.093.290.283	100%	139%
3	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	990.345.218	85%	114%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	653.204.500	100%	107%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	64.270.000	100%	107%
6	Penyediaan alat tulis kantor	86.530.400	100%	105%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.826.387	100%	103%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.975.500	100%	102%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.400.000	100%	120%
10	Penyediaan makanan dan minuman	71.537.922	90%	105%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	839.027.975	100%	102%
B	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	89.265.000	85%	91%
2	Pengandaan	527.626.000	75%	100%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	peralatan Gedung Kantor			
3	Pengadaan mebeuler	292.696.404	60%	117%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	315.167.300	45%	137%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.450.000	45%	151%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	175.172.380	88%	100%
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.480.000	100%	100%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.000.000	100%	100%
3	Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	7.458.600	100%	101%
F	Program			

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	441.623.000	88%	100%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	1.306.791.426	92%	100%
3	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	275.141.250	100%	104%
G	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	2.094.143.000	100%	105%
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	1.056.939.700	76%	100%
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan pusat kendali manajemen dan informasi lalu lintas	354.910.834	43%	100%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Kegiatan penyuluhan bagi	23.546.900	61%	100%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan			
2	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	1.937.901.700	87%	100%
3	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	2.963.750.500	100%	105%
4	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	1.731.577.100	86%	100%
5	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	117.034.550	100%	110%
6	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	203.142.500	52%	103%
7	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	30.692.500	0%	0%
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	6.293.028.733	76%	100%
9	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	47.850.000	74%	100%
10	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan	77.522.000	100%	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	angkutan			
I	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	0	0%	0%
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1.418.285.600	78%	100%
2	Pengadaan marka jalan	963.804.180	100%	101%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	12.900.357.856	61%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.4, terdapat 20 kegiatan dengan nilai efisiensi diatas 100% dan terdapat 17 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Selain itu terdapat 1 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100%.

3. Tingkat Efektivitas

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan analisis *value for money* maka indikator efektivitas adalah membandingkan dampak dari suatu kegiatan dengan hasil yang dicapai oleh kebijakan suatu program.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Kriteria efektivitas:

- a. Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya tidak efektif.
- b. Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya efektivitas cukup berimbang.
- c. Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya sangat efektif.

Dengan rumus diatas dapat dilakukan analisis tingkat efektivitas pada LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Tabel 4.5
Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Pada Program dan Kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	capaian target (%)	Fisik (%)	Tingkat efektivitas
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%
3	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	95%	95%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
10	Penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%

B	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	95%	85%	89%
2	Pengandaan peralatan Gedung Kantor	95%	85%	89%
3	Pengadaan mebeuler	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	100%	100%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100 %	100%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85%	75 %	88%
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%	100%
3	Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	100%	100%	100%
F	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	Penyusunan Kebijakan Norma, Standard an Prosedur bidang Perhubungan	75%	75%	100%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	100%	100%	100%
G	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan n Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	95%	85%	89%
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	95%	86%	91%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	85%	75%	88%
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	100%	100%	100%
3	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	100%	100%	100%
4	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	85%	75%	88%
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	90%	85%	94%
6	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	80%	75%	94%
7	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	95%	90%	95%
I	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	0	0	0
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			

1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	95%	85%	89%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	90%	85%	94%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.5, terdapat 20 kegiatan dengan nilai efektivitas sebesar 100% dan terdapat 13 kegiatan dengan nilai efektivitas dibawah 100%

Tabel 4.6
Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Pada Program dan Kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Persentase capaian target	Fisik	Tingkat efektivitas
A	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%
3	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85%	85%	100%
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
10	Penyediaan makanan dan minuman	90%	90%	100%

11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%
B	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	85%	85%	100%
2	Pengandaan peralatan Gedung Kantor	75%	75%	100%
3	Pengadaan mebeuler	60%	60%	100%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45%	45%	100%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45%	45%	100%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	88%	88 %	100%
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%	100%
3	Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	100%	100%	100%
F	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	88%	88%	100%
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	92%	95%	103%
3	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	100%	100%	100%
G	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	76%	80%	105%
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan pusat kendali manajemen dan informasi lalu lintas	43%	50%	116%
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Kegiatan penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan	61%	65%	106%
2	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	87%	90%	104%
3	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	100%	100%	100%

4	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	86%	90%	104
5	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	100%	100%	100%
6	Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	52%	55%	106%
7	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	76%	80%	105%
8	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas	74%	80%	108%
9	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	100%	100%	100%
I	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	0%	0%	0
J	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	78%	80%	102%
2	Pengadaaan marka jalan	100%	100%	100%
K	Penerangan Jalan Umum dan Penerangan			
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	61%	65%	106%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.6, terdapat 11 kegiatan dengan nilai efektivitas diatas 100% dan terdapat 27 kegiatan dengan nilai efektivitas sebesar 100%.

4.3 Pembahasan

1. Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya dengan biaya serendah-rendahnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran dan pengelolaan sumber daya secara hati-hati. Menurut (Kuncoro, 2020) kriteria ekonomis yaitu (1) Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% maka artinya ekonomis, (2) Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka artinya ekonomis berimbang atau cukup ekonomis, dan (3) jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka artinya tidak ekonomis.

Dilihat dari tabel 4.1, pada tahun 2018 terdapat 33 kegiatan terealisasi dari 11 program kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dari 33 kegiatan tersebut sebanyak 28 kegiatan memiliki hasil perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 28 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan penghematan pengeluaran dari anggaran yang telah ditetapkan pada 28 kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 5 kegiatan lainnya memiliki nilai perhitungan ekonomis sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 5 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada 5 kegiatan ini sama dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Namun ada 1 kegiatan yaitu kegiatan pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal yang memiliki nilai 0% karena tidak adanya realisasi anggaran pada kegiatan tersebut.

Dilihat pada tabel 4.2, pada tahun 2019, terdapat 38 kegiatan yang terealisasi dari 11 program kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dari 38 kegiatan tersebut sebanyak 33 kegiatan memiliki hasil perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 33 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan penghematan pengeluaran dari anggaran yang telah ditetapkan pada 33 kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 5 kegiatan lainnya memiliki nilai perhitungan ekonomis sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 5 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada 5 kegiatan ini sama dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan. Namun ada 1 kegiatan yaitu kegiatan Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan memiliki nilai ekonomis 0% karena tidak adanya realisasi anggaran pada kegiatan tersebut.

2. Tingkat Efisiensi

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kinerja yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Efisiensi dapat dihitung dengan membagi hasil yang dicapai dengan realisasi anggaran dikalikan 100%. Menurut (Kuncoro, 2020) kriteria ekonomis yaitu (1) Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% maka artinya tidak efisien, (2) Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka artinya efisiensi cukup berimbang dan (3) Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka artinya efisien.

Dilihat dari tabel 4.3, pada tahun 2018, terdapat 26 kegiatan memiliki hasil perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 26 kegiatan ini dinyatakan efisien. Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 26 kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 5 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 5 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 5 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 2 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi maka 2 kegiatan ini untuk persentase fisiknya kurang dari persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dilihat dari tabel 4.4, pada tahun 2019, terdapat 20 kegiatan memiliki hasil perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 20 kegiatan ini dinyatakan efisien. Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 20 kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 17 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 17 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 17 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu terdapat 1 kegiatan yaitu kegiatan pengadaan

perlengkapan kantor yang memiliki nilai efisiensi dibawah 100% sehingga dinilai kurang efisien.

3. Tingkat Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan program-program kegiatan yang dijalankan sudah tercapai sesuai sasaran dan tujuan organisasi. Menurut (Kuncoro, 2020) kriteria efektivitas yaitu (1) Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100%, maka artinya tidak efektif, (2) Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka artinya efektivitas cukup berimbang, (3) Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100%, maka artinya sangat efektif.

Dilihat dari tabel 4.5, pada tahun 2018, terdapat 20 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria efektivitas, maka 20 kegiatan ini dinyatakan efektivitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 20 kegiatan ini sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian terdapat 13 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 13 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 5 kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan objek.

Dilihat dari tabel 4.6, pada tahun 2019, terdapat 11 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efektivitas maka 11 kegiatan ini dinyatakan efektif. Hal ini berarti realisasi hasil pada 11 kegiatan tersebut melebihi ekspektasi yang diinginkan objek. Kemudian terdapat 27 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%.

Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 27 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 27 kegiatan tersebut sama dengan ekspektasi yang diinginkan objek.

Terdapat 1 kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen utama *Value for Money* yaitu kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah pada program peningkatan pelayanan angkutan di tahun 2019. Program ini telah mencapai kinerja pelayanan angkutan sesuai dengan prinsip *Value for Money* dimana dengan diperolehnya sasaran persentase titik kemacetan telah teratasi dengan baik. Sedangkan untuk tahun 2018 tidak ditemukan kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen *Value for Money* karena pada tahun 2018 belum ada kegiatan yang mencapai nilai efektivitas diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yaitu akuntabilitas kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip *Value for Money*. Meskipun hampir semua kegiatan telah ekonomis dan efisiensi pada tahun 2018 dan 2019 tetapi banyak kegiatan yang dinilai belum efektif. Banyak dari kegiatan yang memiliki nilai efektivitas sama dengan 100% yang berarti program-program kegiatan yang dijalankan tidak melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dilakukan analisis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode *Value for Money* yang meliputi pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dengan ini penulis menyimpulkan

1. Tingkat ekonomi

Pada tahun 2018 terdapat 28 kegiatan dari 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat ekonomis. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 33 kegiatan dari 38 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat ekonomis. Hal ini berarti pada tahun 2018 dan 2019, 86% kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat ekonomis

2. Tingkat efisiensi

Pada tahun 2018 terdapat 26 kegiatan dari 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat efisien. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 20 kegiatan dari 38 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat efisien. Hal ini berarti pada tahun 2018 dan 2019, 65% kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat efisien

3. Tingkat efektivitas

Pada tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang bersifat efektif. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 11 kegiatan dari 38 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat efektif. Hal ini berarti pada tahun 2018 dan 2019, 15% kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersifat ekonomis

Selain itu, pada tahun 2018 dan 2019 hanya terdapat 1 kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen utama *Value for Money*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum memenuhi prinsip *Value for Money*.

5.2 Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk dimasa yang akan datang diharapkan dapat mengevaluasi program kegiatan yang dijalankan agar dapat memperbaiki kinerja dan dapat memenuhi elemen-elemen *Value for Money*. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya juga menerapkan analisis *value for money* sebagai pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini sangat bermanfaat agar dalam pengambilan keputusan untuk seluruh program-program dapat berjalan dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, penerapan *value for*

money sangat bermanfaat yaitu sebagai pengukur kinerja sektor publik yang telah dijalankan serta meningkatkan kerjasama antar sub bagian sehingga mampu mencapai target yang ingin dicapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang memiliki data yang lebih lengkap dan relevan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga dapat mengetahui informasi secara luas mengenai akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (2017). Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.*
- (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.*
- Pengadaan (Eprocurement).* (2019, Januari 11). Retrieved Maret 4, 2021, from Kupas Tuntas Konsep Value For Money Sektor Publik: <https://www.pengadaan.web.id/2019/01/konsep-value-for-money.html?m=1>
- Dwinanda, Y. (2018). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Huang, H. (2019). Penelitian Deskriptif. *Globalstatistik Academic.*
- Inmas, S. (2017). *LAKIP sebagai sarana evaluasi kinerja dan akuntabilitas.* Wonogiri: Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Ismail. (2018, Maret 20). *Pertanggungjawaban_Publik Akuntansi Sektor Publik.* Retrieved 2020, from SlideShare: <https://www.slideshare.net/ismailm16/pertanggungjawaban-publikakuntansi-sektor-publik>
- Kasdjani, A. M. (2013). Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *My Note in Accounting, Akuntansi Sektor Publik, Data Catatan Study, Home.*
- Kuncoro, H. (2020). Value for Money; Definisi, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran. *Ekonomi.*
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.
- Nursamah. (2018, November 23). *LAKIP dan Penilaian SAKIP Tolak Ukur Kinerja PNS.* Retrieved Maret 4, 2021, from <https://www.kkptanjungpriok.net/informasi/info-publik/berita/berita-umum/item/761-lakip-dan-penilaian-sakip-tolak-ukur-kinerja-pns>
- Prasetyo, A. (2016, September 7). Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif.

- Purwiyanti, D. (2017, Maret). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu).
- Putri, N. Z. (2020). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Riadi, M. (2020, Mei 9). Value for Money. *KajianPustaka.com*.
- Ridhotillah, R. R. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja LAKIP Dengan Menggunakan Value For Money Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Palembang.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan A.b., W. G. (2016). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor.
- Warsito, A. (2018, November 21). *Pengusaha*. Retrieved Maret 4, 2021, from Apa itu Indikator Kinerja Utama dan Kegunaannya: <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-indikator-kinerja-utama/#.YEEMHVOySSU>